

Transformasi Denpasar dari Kota Agraris Menjadi Kota Budaya, 1906-1979

Anak Agung Ayu Dewi Girindrawardani,¹ Slamet Trisila^{2*}

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Indonesia

²Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Bali, Indonesia

Email: slamattrisila@gmail.com

*Korespondensi



Received: 07-02-2024, Revised: 25-11-2024, Accepted: 25-11-2024, Published: 29-11-2024

Abstrak

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali saat ini seakan-akan tidak tampak bahwa kota tersebut sebenarnya awalnya kota agraris dan tidak dirancang sebagai kota modern. Terbentuk Kota Denpasar yang modern disebabkan oleh pergeseran kekuasaan, perkembangan pariwisata budaya, dan sirkulasi perdagangan, baik regional maupun internasional di Bali sejak awal Abad XX. Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan penulisan sejarah kota (lokal) Kota Denpasar tahun 1906-1979 dari aspek sosial-ekonomi dan budaya. Penulisan ini menggunakan metode sejarah sebagai alat membedah dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada Kota Denpasar selama kurun waktu 60 tahun. Transformasi Denpasar berkembang dari awalnya kota agraris kemudian menjadi kota budaya awal abad XX. Zaman kolonial menjadi titik awal masa modernisasi Denpasar dalam arti pembangunan fisik, namun di sisi lain Belanda dengan kebijakan *Baliseering*-nya menjadikan Bali termasuk Denpasar sebagai Museum Kehidupan (*living museum*). Masyarakat Denpasar pada awalnya lebih berkarakter agraris, dengan penyediaan berbagai fasilitas, baik yang terencana oleh pemerintah kolonial maupun yang berkembang spontan, bergerak menjadi masyarakat urban. Berdirinya Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI, sekarang Institut Seni Inodensia (ISI) Denpasar) tahun 1967, pembangunan Art Center Bali tahun 1978, dan bergulirnya Pesta Kesenian Bali di Denpasar tahun 1979 sebagai puncak kegiatan kebudayaan Bali menjadikan Denpasar sebagai barometer kota budaya dan Pusat Kebudayaan Bali.

Kata Kunci: Denpasar; kota budaya; kota agraris; sejarah kota

Abstract

It does not seem to appear that Denpasar, the current capital of Bali Province, was originally an agricultural city and was not designed as a modern city. However, the modern city of Denpasar was formed due to power shifts, the development of cultural tourism, and the circulation of trade, both regional and international, in Bali since the beginning of the 20th century. This article aims to convey the written history of Denpasar City, 1906–1979, from socio-economic and cultural aspects. This essay uses historical methods as a tool to dissect and explain the changes that occurred in Denpasar City over 60 years. The transformation of Denpasar developed from initially being an agricultural city to becoming a cultural city at the beginning of the 20th century. The colonial era was the starting point for the modernization of Denpasar in terms of physical development, but on the other hand, the Dutch, with their *Baliseering* policy, made Bali, including Denpasar, a living museum. Denpasar, which was initially more agricultural, with the provision of various facilities both planned by the colonial government and those that developed spontaneously, is moving

towards becoming an urban society. The establishment of Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI, now Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar) in 1967, the construction of the Bali Art Center in 1978, and the launch of the Bali Arts Festival in Denpasar in 1979 as the launch of the Bali Arts Festival in Denpasar in 1979 as the peak of Balinese cultural activities made Denpasar a barometer of cultural cities and Bali Cultural Center.

Keywords: agricultural city; city history; city of culture; Denpasar



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Penulisan sejarah kota di Indonesia termasuk tema yang menarik perhatian di kalangan akademisi dan birokrat karena penulisan sejarah kota yang melibatkan para peneliti (akademisi) menghasilkan karya ilmiah berupa tesis, dan disertai, sementara pimpinan daerah biasanya menunjuk akademisi terkait dengan penelusuran berdirinya sebuah kota atau dalam rangka peringatan hari jadi sebuah kota. Sejarah kota di Indonesia sebagai bidang kajian dapat dilacak dari peninggalan dari berbagai aktivitas dagang berupa bandar (pelabuhan), bangunan pertokoan, dan jalan-jalan yang menjadi sarana transportasi atau penghubung untuk keperluan ekonomi; aktivitas politik, meliputi pusat pemerintahan, militer, dan ruang publik; aktivitas sosial-budaya berupa rekam jejak jenis seni (tari, musik, dan kriya) yang berkarakter atau khas daerah, komunitas penopang tradisi, dan karya maestro sebagai identitas kota.

Perkembangan kota-kota di Bali sebagian besar bertitik tolak pada aktivitas politik tradisional yang dibangun atas kekuasaan raja dan purinya (keraton). Dari sembilan kabupaten/kota yang ada sekarang semua berbasis pada kerajaan-kerajaan yang pernah otonom pada masing-masing wilayah kekuasaannya, seperti Klungkung, Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, dan Denpasar. Hanya Kerajaan Mengwi yang dulu pernah masyhur di Bali sekitar abad ke-17-19, namun tidak mampu mengembalikan otoritasnya menjadi sebuah kabupaten pada era modern (Nordholt, 2006).

Di antara kota-kota yang terbesar dan mengalami perkembangan yang cukup dinamis di Bali, yakni Singaraja dan Denpasar. Singaraja berkembang lebih awal karena masuknya pemerintah kolonial Belanda di Buleleng pada tahun 1849 setelah kekalahan Kerajaan Buleleng pada Perang Jagaraga. Singaraja awalnya menjadi ibu kota Residen Bali-Lombok berlanjut pada masa peralihan Indonesia merdeka tetap menjadi ibukota Provinsi Sunda Kecil. Singaraja tidak lagi menjadi ibu kota Provinsi Bali pada pembentukannya tahun 1958 dan dipindahkan ke Denpasar. Denpasar pada zaman kolonial hanya sebagai ibu kota Asisten residen Bali Selatan. Akan tetapi, fasilitas dan letaknya yang strategis di antara kerajaan lain di Bali Selatan sehingga perkembangan Kota Denpasar lebih dinamis sebagai kota modern.

Perkembangan Kota Denpasar maupun dinamika masyarakat Denpasar yang diangkat sebagai bahasan utama disandarkan pada periode zaman penjajahan Belanda sejak tahun 1906 hingga masa kemerdekaan. Suatu peristiwa itu tidak berdiri sendiri sehingga peristiwa-peristiwa yang mendahului pun perlu diungkapkan agar mendapatkan gambaran yang jelas mengapa suatu peristiwa dapat terjadi.

Beberapa tulisan yang menyangkut tentang Kota Denpasar yang pernah diteliti atau dipublikasikan dapat dipastikan tidak memiliki kesamaan. Hal ini terkait basis penelitian dan proses penulisannya yang berbeda. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh A. A. B. Wirawan dkk. yang dibukukan dengan judul *Sejarah Kota Denpasar: Dari kota Keraton Menjadi Kota 1788-2010* merupakan upaya untuk menelusuri Kota Denpasar, dari sejarah berdirinya Puri Denpasar hingga berkembang menjadi sebuah kota yang secara administratif setara dengan pemerintahan kabupaten. A. A. B. Wirawan dkk. berpijak pada eksplanasi sejarah dalam menggambarkan perkembangan Denpasar sebagai ibu kota kerajaan tradisional (kota Keraton) hingga menjadi ibu kota Provinsi Bali dan terbentuknya sebagai Kota Denpasar.

Penelitian yang diangkat oleh F. X. Sunaryo sebagai Tesis S-2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengenai "Sejarah Kota Denpasar 1906-1942". Penulis menyoroti perkembangan Kota Denpasar secara birokratis selama periode pemerintahan kolonial di Bali dan terutama Bali Selatan yang pusat pemerintahannya di Denpasar. Selama periode tersebut terjadi perombakan birokrasi dari sistem tradisional ke birokrasi modern dimana posisi penguasa kolonial berada pada pucuk pimpinan.

Pada tahun 2004 diselenggarakan *The 1st International Conference on Urban History Indonesia* diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya dan kumpulan makalahnya diterbitkan oleh Ombak tahun 2015. I Ketut Ardhana dari Universitas Udayana menyampaikan kertas kerja dengan tema "Denpasar: Perkembangan dari Kota Kolonial hingga Kota Wisata." Tulisan ini menekankan perubahan yang terjadi di Denpasar terutama pengaruhnya kolonialisme Belanda hingga dinamika perekonomian, perdagangan, dan pariwisata yang menyumbangkan cukup signifikan perkembangan Kota Denpasar.

Tulisan-tulisan di atas berpijak pada kajian historis yang bersifat politis dengan analisis deskriptif dan naratif. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti transformasi Denpasar dari sisi sosial-ekonomi dan budaya. Terkait dengan penjabaran latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperjelas dan menganalisis yang lebih tajam terkait aktivitas sosial-ekonomi dan budaya di Denpasar dan perubahan Denpasar menuju Kota Budaya.

Metode

Dalam upaya melacak dinamika Kota Denpasar digunakan metode sejarah yang terdiri atas 4 (empat) tahap yang secara umum dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi atau sintesa, dan tahap terakhir historiografi (Gottschalk, 1986, p. 32). Langkah awal seabgai upaya menemukan sumber atau arsip sangat fundamental sebelum pada tahap selanjutnya dilakukan kritik terhadap arsip yang bertujuan untuk meneliti otentisitas sumber, atau keaslian sumber, dan meneliti kredibilitas sumber. Setelah dilakukan kritik arsip, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap berbagai data arsip yang telah terkumpul. Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah sebagai bagian dari upaya merekonstruksi peristiwa atau perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lampau.

Hasil dan Pembahasan Perubahan Kota Denpasar

Sebagian besar keberadaan kota-kota di Asia Tenggara terbentuk dari warisan sejarah masa-masa sebelumnya. Daerah itu terlahir sebagai hasil dari aktivitas pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana kerajaan, dan perkembangan perdagangan atau sumber perekonomian lainnya, yang memungkinkan terjadinya intensitas interaksi antarorang per orang atau kelompok perkelompok yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah yang bukan menjadi pusat. Sebagai akibatnya daerah ini mengalami berbagai perkembangan dalam berbagai sisi sektor kehidupannya, seperti demografi, teknologi, organisasi dan lingkungan (Ardhana, 2005, p. 405).

Menelusik sejarah Denpasar yang berawal dari sebuah puri atau keraton yang didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan tahun 1788 M merupakan pecahan dari Kerajaan Badung (Tim Penulis Sejarah, 2024, p. 177). Puri Denpasar arti secara harfiah terkait tata letak puri, yakni *den* bahasa Bali artinya utara, pasar atau tempat berdagang. Dengan demikian, Denpasar merupakan puri atau keraton yang letaknya di utara pasar. Dari Puri Denpasar inilah menjadi sentrum perkembangan ekonomi, sosial, dan politik sehingga mengalami perubahan sosial dan fisik Kota Denpasar sejak zaman kolonial hingga era pembangunan Orde Baru.

Denpasar sebagai Kota Agraris

Mengikuti perjalanan sejarahnya, Denpasar merupakan nama kerajaan yang seringkali dipergunakan untuk menyebutkan Kerajaan Badung yang dikenal pada masa sebelumnya, sebagai pusat pemerintahan dan juga perekonomian, yakni pasar di sebelah selatan Puri Denpasar. Denpasar juga merupakan salah satu nama dari tiga kerajaan yang setara, yang berkuasa di wilayah Badung, pada pertengahan abad ke-18, yakni Kerajaan Pemecutan, Kerajaan Kesiman, dan Kerajaan Denpasar (Tim Penulis Sejarah, 2024).

Secara historis, kabupaten-kabupaten di Bali pada awalnya berasal dari pusat-pusat kerajaan, yang memiliki adat istiadat, sumber pendapatan, dan sistem pemerintahan tersendiri. Pada abad ke-17 dan 18 sumber pendapatan kerajaan, yakni dari perdagangan dan pertanian pada skala yang lebih kecil, sementara karena berbagai faktor penyebab, pada awal abad ke-19, sektor pertanian, baik dari budidaya maupun perdagangannya mulai diintensifkan dan menjadi sumber pendapatan kerajaan (Nordholt, 2006, p. 16).



Gambar 1. Lahan persawahan di sekitar Denpasar tahun 1936
Sumber: (Koleksi KITLV Leiden)

Topografi

Pada awal abad ke-20 atau tepatnya setelah *Puputan* Klungkung 1908 (dua tahun setelah *Puputan* Bandung 1906), Bali secara penuh di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial. Pembagian wilayah Bali, meliputi Buleleng, Jembrana dan Bali Selatan. Pemerintah Kolonial Belanda memasukkan Denpasar ke dalam otoritas Bali Selatan yang merupakan wilayah afdeling termasuk yang juga meliputi wilayah Tabanan, Klungkung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem.

Kedudukan Denpasar menjadi penting ketika, jalur perekonomian di wilayah Bali Utara (Buleleng) mengalami penurunan aktivitas perdagangan. Pertumbuhan perekonomian di Bali Selatan berkembang cukup pesat karena mendapat dukungan atau suplai bahan-bahan komoditas ekspor dari daerah-daerah sekitarnya, seperti pelabuhan Sanur, Benoa, Kuta Timur, Tanjung Benoa (Badung), Ketewel (Gianyar), Padang Bai (Karangasem), Kusamba (Klungkung), dan Seseh (Mengwi). Pada pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-19 ini, pedagang-pedagang dari Bugis Mandar, dan Melayu, dengan menggunakan kapal-kapal kecil, banyak mengambil barang dagangannya ke Bali untuk dibawa ke Singapura, bahkan ke Cina—pada pertengahan abad ke-18, Cina mengalami bencana kelaparan, ekspor beras dari Bali diperkirakan mencapai 12.000 sampai 15.000 koyan (Agung, 1989, p. 81). Pada waktu itu, kapal-kapal dagang besar, tidak bisa berlabuh di Bali karena tipe pantai di Bali yang banyak karang (sulit diperkirakan bagian pantai yang berkarang atau tidak).

Wilayah bagian selatan Denpasar, berbatasan dengan pantai, antara lain Sanur, Benoa, dan Kuta. Pelabuhan Sanur termasuk daerah pesisir yang menjadi salah satu pintu masuk ke Kota Denpasar pada abad ke-19. Beberapa bangunan yang menunjang aktivitas pabean telah didirikan oleh pemerintah Kolonial di Sanur dan Kuta. Sanur dipandang strategis karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Denpasar dari sisi timur. Hal inilah salah satu alasan penyerangan dalam *Puputan* Badung tahun 1906 pihak militer Belanda mendaratkan pasukannya di Pantai Sanur (Creese, et al. 2006; lihat Gambar 2).



Gambar 2. Pantai Sanur sebagai pendaratan pasukan Belanda dalam Puputan Badung 1906

Sumber: (Koleksi KITLV Leiden)

Pelabuhan di Denpasar yang cukup penting adalah pelabuhan Sanur dan Benoa. Pelabuhan Sanur terletak di sebelah timur ibu kota kerajaan dan lebih dekat dengan Puri Kesiman. Pelabuhan Sanur adalah tempat persinggahan dagang yang datang dari arah timur, yakni Padang Bai (Karangasem) dan Ampenan (Lombok). Sebelum jatuhnya Kerajaan Badung, 1906, pelabuhan Sanur dipegang oleh Syahbandar Tionghoa. Sementara sewaktu Pemerintahan Kolonial Belanda infrastruktur yang dibangun, yakni pos militer dan kantor pos kecil (Trisila, 2008). Pembangunan Pelabuhan Benoa mulai pada 1920, oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengerahkan pekerja paksa yang penuh perjuangan mengalahkan tantangan penyakit malaria (Nordholt, 2006, p. 366). Dari sinilah, kapal-kapal berangkat ke Surabaya, Batavia, dan Singapura, menghubungkan Bali dengan Pasar Dunia. Pembangunan dan perluasan dermaga Benoa kemudian dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang sebagai pelabuhan pertahanan.

Pelabuhan Kuta bagian timur cukup strategis untuk berlabuhnya kapal-kapal dari berbagai musim karena terlindung oleh daratan menjorok ke laut, yakni Tanjung Benoa dan secara alami sebagai penghalang ombak besar dari pantai lepas (selatan). Masa keemasan pantai timur Kuta sebagai aktivitas perdagangan, Ketika Mads Lange memegang kendali sebagai perbekel dan syahbandar di Kuta pada abad ke-19. Mads Lange seorang saudagar yang berasal dari Denmark ini tidak hanya menjadi wakil Raja Badung yang berkedudukan di Puri Kesiman dalam hal perdagangan, namun ditunjuk pula sebagai duta dalam perundingan atau perjanjian politik (kontrak politik) dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia (Block, 2007).

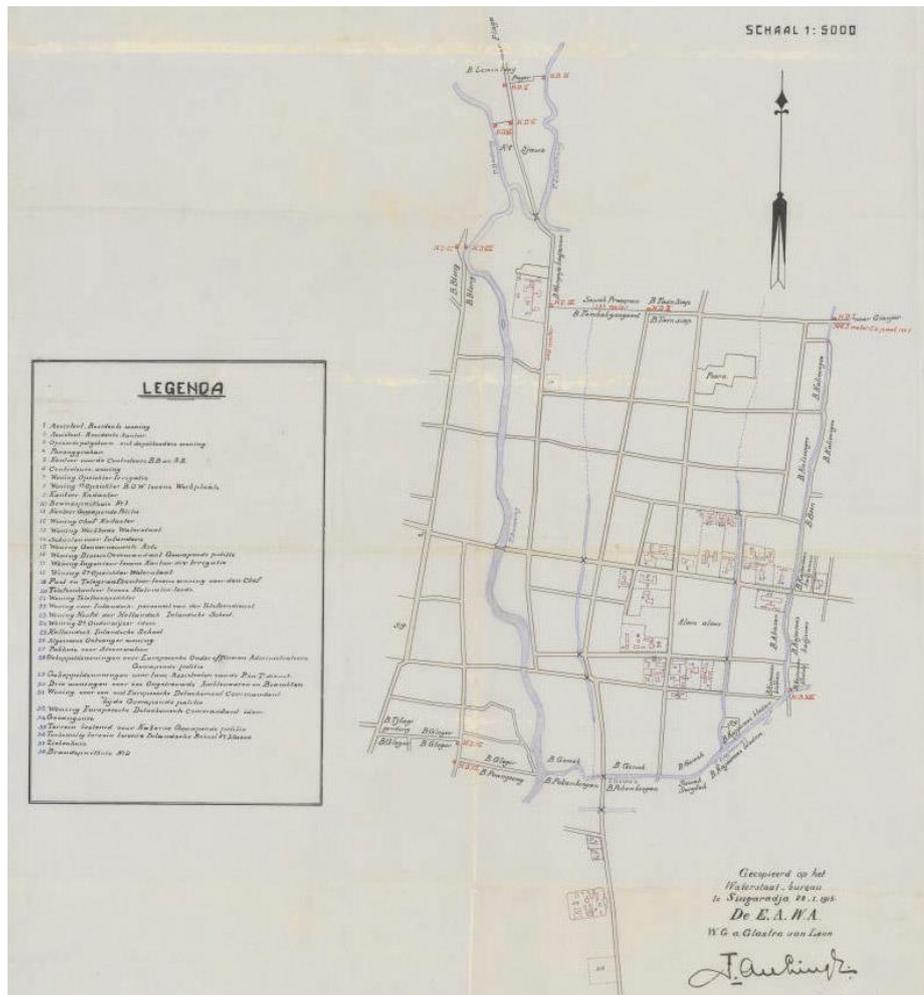
Secara Geografis, Kota Denpasar mempunyai Luas 12.398 km². Tanahnya merupakan endapan alluvial, yaitu terdiri dari endapan-endapan sungai dan lapukan tanah vulkanik. Denpasar sampai pada masa kolonial, adalah bagian dari wilayah Badung, sebuah wilayah yang bercirikan agraris dan dikelilingi pantai dari sisi barat, selatan, dan timur (Kuta, Kedonganan, Jimbaran, dan Sanur) dan oleh karenanya di wilayah pantai selain nelayan ditemukan penduduknya sebagai petani garam. Pada tahun 1958, Denpasar ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi

Daerah Tingkat I Bali, selanjutnya bersamaan dengan pemekaran wilayah Denpasar dan Kesiman, berdasar Peraturan Pemerintah no 20 tahun 1978, berubah status menjadi Kota Administratif yang membawahi 3 kecamatan dengan luasan yakni: Denpasar Barat dengan luas 50,06 km², Denpasar Timur 27,73 km² dan Denpasar selatan dengan luas 46,19 km². Denpasar Selatan dan Timur memiliki ketinggian dari permukaan laut yang sama yakni 0-75 meter, sedangkan Denpasar Barat 12-75m. Sementara jarak antara kecamatan dengan pusat kota, yakni 4-5 km. Di Denpasar terdapat 16 wilayah kelurahan, 27 desa, dan 35 desa adat.

Bagian utara Denpasar merupakan wilayah pertanian yang subur dan semakin ke utara masuk wilayah Pelaga dan Catur (Bangli) sebagian terdapat perkebunan kopi dan cengkeh. Di sebelah timur Denpasar berbatasan dengan wilayah Gianyar dan sebelah barat berbatasan dengan Tabanan. Pada saat ini perbatasan Kota Denpasar di sebelah barat adalah wilayah Badung.

Jalan-jalan yang di barat menghubungkan antarwilayah atau ke luar daerah, seperti ke Tabanan, Mengwi, dan bagian timur ke Gianyar mulai dibuka pada awal abad ke-19, oleh raja-raja Badung. Salah satu jalan yang penting dari Kesiman menuju Kuta, menurut laporan Van Eck yakni melalui Pagan, Tatasan, Tonja, Denpasar, Titih, Alang Badung, Suci, Monang-Maning, Tenten, Buagan, Abian Timbul dan akhirnya Kuta (Wirawan, et al., 2011). Selama satu dekade pemerintah kolonial Belanda, mengerahkan pekerja paksa untuk membuat jalan-jalan yang mempermudah arus perdagangan di sebagian besar Bali Selatan, yakni rute timur ke barat membentang dari Karangasem, melalui Klungkung, Gianyar, Denpasar, Kapal dan Mengwi ke Tabanan. Juga dibangun jalan yang menghubungkan Denpasar dengan Pelabuhan Benoa (Nordholt, 2006, p. 365). Pada awal abad ke-20, jalan yang semula berupa jalan setapak dan berumput, mulai diadakan pengerasan dengan aspal dan pelebaran ruas jalan. Menurut L.U. van Stenis pemerintah kolonial Belanda melakukan pengaspalan jalan antara lain Denpasar-Sanur sepanjang 7 km, Denpasar-Kuta sepanjang 11 km, Denpasar-Gianyar 27 km, Denpasar-Tabanan 20 km, dan Denpasar-Singaraja 87 km (Wirawan, et al., 2011). Jalanan di dalam Kota Denpasar masih sebatas menghubungkan antarpuri dan jalan-jalan kecil atau rurung kebanyakan menuju daerah persawahan atau peternakan (lihat Peta Denpasar tahun 1915).

Kota Denpasar dilintasi oleh dua sungai besar, yakni Sungai Ayung di bagian timur dan Sungai Badung di bagian barat, serta sungai kecil dari utara (daerah pegunungan) ke selatan atau ke laut. Sungai-sungai tersebut sebagian besar dimanfaatkan sebagai pengairan pertanian dengan sistem *subak* (irigasi tradisional). Pada zaman Belanda, pemerintah membuat beberapa dam (bendungan) untuk kepentingan pemerataan irigasi. Salah satu dam yang terbesar yang membendung Sungai Ayung adalah Dam Oongan yang masih berfungsi sampai sekarang dan letaknya di Jalan Noja.



Peta Denpasar tahun 1915
Sumber: (KITLV Leiden).

Demografi

Data mengenai penduduk Kota Denpasar pada awal berdirinya Kerajaan Badung, belum ditemukan data yang pasti. Identifikasi penduduk secara pasti dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1930-an. Bila dilihat dari proporsi penduduk Bali secara keseluruhan dengan Badung ditambah Mengwi, yakni:

Tabel 1. Proporsi penduduk Bali secara keseluruhan

Tahun	Bali	Bali Selatan	Badung dan Mengwi
1909	750.000	143.400	-
1920	947.000	766.800	173.300
1930	1.092.037	889.527	192.400

Sumber: (Nordholt, 2006).

Sementara dari sumber lain yang lebih detail mengulas tentang Badung menyebutkan bahwa pada akhir abad ke-19 adalah 71.800 jiwa, yang terdiri atas Suku Bali Hindu 60.000 jiwa, Bugis dan Arab 6.000 jiwa, Jawa 5.000 jiwa, dan Tionghoa 600 jiwa (Soenaryo, 1989, p. 49). Berdasar sensus penduduk tahun 1930 penduduk Denpasar yakni 62.329 jiwa orang, terdiri dari Eropa 155 jiwa, Tionghoa 1.170 jiwa, Timur Asing lainnya 250 jiwa, dan pribumi 60.754 jiwa. Dari perkembangan penduduk yang sedemikian rupa, pemerintah kolonial melakukan penataan pemukiman, yakni orang Bugis di Pulau Serangan, Tuban dan daerah Tanjung, sedangkan orang Sasak, Madura, dan Jawa menempati lokasi di kampung Wanasari (Kampung Jawa) dan daerah Kepaon.

Seiring dengan pembangunan dan perbaikan jalan, tumbuh perkampungan-perkampungan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. Sepanjang jalan yang menghubungkan antara Puri Denpasar sampai Puri Pemecutan tumbuh perkampungan orang-orang Tionghoa, sementara jalan yang menuju ke selatan tumbuh kampung Arab dan Timur Asing lainnya.

Daerah yang termasuk padat penduduk berada di sekitar Puri Pemecutan dan Puri Denpasar (Puri Satria). Bahkan di dekat Puri Denpasar terdapat pasar dan perkampungan. Pasar menjadi indikasi keramaian karena menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Intensitas pertemuan atau transaksi dalam skala besar menandai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dari pedagang musiman hingga pedagang yang menetap juga menambah ekuivalensi kehidupan perkotaan.

Hingga awal abad ke-20 perekonomian masyarakat Denpasar masih berbasis agraris. Daerah-daerah seperti Tampak Gangsul, Tonja, Kesiman, Renon, dan Sesetan merupakan penopang produksi beras di Denpasar. Pergeseran basis ekonomi masyarakat ini sedikit demi sedikit terjadi semenjak kejatuhan kerajaan-kerajaan Bali pada 1906/1908 dan memasuki masa pemerintahan kolonial. Bentuk keteraturan yang diciptakan pemerintah kolonial, menjadikan tercerai-berainya tatanan yang telah lama menopang masyarakat Bali, terutama pada sistem pertanian dan faktor-faktor lain yang menunjangnya, seperti sistem *subak*, kepemilikan tanah, sistem pajak, dan sebagainya. Sebagai akibat, pengorganisasian yang ala kolonial pada sistem *subak* menjadikan suplai air pertanian tidak merata, begitu pula sistem kepemilikan tanah disertai dengan pajaknya menjadikan rantai pengelolaan dan sumber dayanya menjadi terputus, sehingga para petani akhirnya tidak mempunyai tanah untuk lahan garapan, sementara pemilik tanah tidak mempunyai orang untuk menggarap sawah-sawahnya. Selain itu faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh, yakni pertumbuhan penduduk. Table 2. di bawah ini menunjukkan penyempitan lahan pertanian yang terjadi pada awal abad ke-20.

Table 2. Perubahan Luas Lahan Pertanian

Tahun	Sawah dalam ha	Tegalan dalam ha
1923	19,340	26,865
1937	19,157	20,586

Sumber: (Nordholt, 2006).

Pola perdagangan di Bali Selatan dicirikan perdagangan monopoli dan di sisi lain ada peran para saudagar kecil sebagai pedagang perantara. Pada 1915, ketika Bena masuk rute pelayaran, transportasi keluar negeri sepenuhnya diawasi oleh *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), sedangkan perusahaan perdagangan terutama ekspor-impor, oleh *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM), yang berkedudukan di Denpasar. Sementara di tingkat pengecer dilakukan oleh pedagang Tionghoa dan perempuan Bali. Mereka penghubung antara Denpasar dengan berpuluh-puluh pasar lokal selanjutnya dengan rumah tangga (Nordholt, 2006, p. 367).

Sebelum masa pemerintahan kolonial Belanda, pedagang Tionghoa mempunyai hak keistimewaan dalam bidang perdagangan (Trisila, 2008). Barang dagangan yang mereka kuasai yakni impor kebutuhan masyarakat Bali pada masa itu, seperti tekstil, mesiu, dan candu, sementara ekspor yakni hasil bumi. Setelah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda hak monopoli itu ditiadakan, namun mereka mempunyai jaringan dengan kerabat dan sejawatnya yang eksklusif. Mereka bergerak dalam bidang pembiayaan, (pinjaman) modal ke pedagang-pedagang kecil. Setelah kemerdekaan mata pencaharian masyarakat mulai beragam karena hal ini ditopang dengan sistem birokrasi yang telah dikelola oleh pemerintah Indonesia. Profesi sebagai guru, pegawai negeri, wartawan, militer, dan swasta lainnya menambah keragaman masyarakat Denpasar dari segi tatanan sosial.

Denpasar Sebagai Kota Budaya

a. Perubahan Fisik Kota Denpasar

Perkembangan Kota Denpasar dapat dikatakan cukup dinamis sejak kedudukan Bali Selatan menempatkan Denpasar sebagai ibukota atau pusat pemerintahan. Berdasarkan peta kolonial yang dibuat oleh A. Glastra van Loon yang diterbitkan pada tahun 1915 memuat denah yang berisi lokasi-lokasi kantor pemerintahan, sekolah, penjara, kantor polisi, pemadam kebakaran, kantor pos, dan telegraf, kantor telepon, dan bahkan gudang opium. Semuanya mengindikasikan proses modernisasi kota dan juga “Penyakit masyarakat” (Putra, 2010).

Kota Denpasar pada masa kolonial jalan-jalan belum diberi nama. Nol kilometer atau sebagai pusat peta kota Denpasar terletak pada sekitar Alun-alun (kini Lapangan Puputan). Pada perempatan jalan antara Bali Hotel, Kantor Asisten Residen, dan Alun-alun terdapat jam kolonial sebagai penanda titik pusat kota Denpasar. Tempat jam kolonial kemudian diganti dengan Patung *Caturmuka*, sementara jam kolonial diletakkan pada sudut bangunan rumah Jabatan Gubernur.

Di sebelah utara alun-alun, ada tiga kompleks bangunan: kantor Asisten Resident (paling barat), rumah Asisten Resident (tengah), dan Kantor Pos dan Telegraf sekaligus rumah pimpinannya (timur). Keberadaan Kantor Pos pada masa kolonial sangat vital karena sebagai alat komunikasi dengan surat masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat (kolonial dan pribumi).

Di sebelah timur Kantor Pos atau Jalan Kaliasem terdapat tiga kompleks bangunan, yaitu kantor telepon serta rumah pimpinan dan karyawannya. Hadirnya Kantor Pos dan Kantor Telepon tahun 1915 sekitar satu dasawarsa setelah Puputan Badung, bisa dilihat sebagai tanda kemajuan Kota Denpasar. Bagi pemerintah kolonial, komunikasi lewat surat dan telepon tampaknya merupakan prioritas,

untuk memperlancar birokrasi atau memperteguh kekuasaannya (Putra, 2021, p. 17-18).

Perkembangan Denpasar dalam kekuasaan pemerintah Belanda juga memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan mendapat perhatian oleh pemerintah kolonial Belanda dapat dilihat pada penambahan sekolah yang ada di Denpasar. Hadirnya dua sekolah modern Belanda Denpasar menjadi pertanda akan kemajuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Pertama, sekolah untuk pribumi (*Schoolen voor Inlanders*), lokasinya di seberang selatan Alun-alun, diperkirakan di lokasi kantor Pertamina (sekarang). Sekolah yang kedua adalah *Hollandsch Inlandsch School* (HIS) lokasinya di Jalan Surapati, di seberang jalan dari sekolah itu ada dua perumahan untuk kepala sekolah dan guru (Ardhana, 2005).

Di sebelah timur sekolah ada kantor polisi dan timurnya lagi kantor Irigasi dan perumahan pejabatnya. Di ujung timur, yang kini kantor Garuda Indonesia adalah tanah kosong. Beberapa tahun kemudian, di Jalan Veteran itu dibangun kantor KPM (perusahaan kapal layar Belanda) yang berurusan dengan pariwisata, pendirian Bali Hotel tahun 1928. Bangunan Bali Hotel menempati bekas gudang opium dan rumah penjaganya yang berlokasi di Jalan Veteran (Putra, 2021, p. 18-19).

Di luar nol kilometer Kota Denpasar terdapat beberapa bangunan kolonial yang masih berfungsi hingga sekarang. Salah satunya adalah Rumah Sakit Wangaya yang sudah ada tahun 1915. Rumah sakit Wangaya merupakan bagian dari tempat pengobatan bagi tentara Belanda kemudian dibuka untuk umum. Letak rumah sakit Wangaya tidak jauh dari Banjar Wangaya Kaja yang bangunannya bergaya campuran indis dan tradisional.

Situasi jalan-jalan pada masa kolonial terkesan lebar dan masih lengang, tetapi fungsi jalan sangat signifikan untuk kelancaran arus transportasi dan pengangkutan berbagai komoditi dari desa ke kota atau antarkota di Bali. Kawasan sentra perdagangan yang ditempati oleh etnis Tionghoa atau sering disebut Pecinan. Beberapa ruas jalan utama, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Sotomo, dan Jalan Kartini sekarang merupakan pusat kota Denpasar di sektor perdagangan.

Pada Masa pendudukan Jepang di Pulau Bali, kota Denpasar juga digunakan sebagai pusat kekuatan angkatan laut. Periode pendudukan Jepang tidak banyak terjadi perubahan fisik kota Denpasar, selain karena singkatnya masa pemerintahan Jepang juga karena Jepang lebih menekankan eksploitasi terhadap sumber daya dan ekonomi masyarakat dalam hal menyuplai bahan makanan untuk pasukannya yang berperang dan pengerahan massa terutama kaum laki-laki untuk kerja romusha. Peninggalan Jepang yang mencolok adalah perbentengan berupa goa yang ada di beberapa daerah di Bali. Di Denpasar terdapat goa Jepang di dam Oongan. Letak goanya cukup strategis untuk persembunyian dan pertahanan dikala perang.

Perubahan fisik Kota Denpasar pascakemerdekaan juga tidak terlalu signifikan karena obyek vital yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang, seperti kantor pemerintahan, kantor telegraf dan telekom, kantor pos, dan rumah sakit masih dapat digunakan. Perubahan mencolok yang mengubah lanskap Denpasar pada Orde Lama dan awal Orde baru, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, pendirian Universitas Udayana, Hotel Bali Beach di Sanur, dan Pura Jagatnatha.

b. Pusat Kebudayaan Bali

Secara territorial, wilayah Denpasar pada masa kerajaan sampai pada akhir pemerintahan Hindia Belanda adalah wilayah agraris. Budaya yang tumbuh lebih bersifat komunal, dan lebih berorientasi pada masalah-masalah yang terkait dengan religiusitas. Hal ini mudah dilihat yakni bentuk peruntukkan atau fungsi dari aktivitas seni yang hidup pada masa itu. Karya-karya seni atau pegiat-pegiat seni berkembang di sekitar lingkup pura dan puri, karena di tempat-tempat itulah ekspresi seni dapat tertampung secara maksimal, dengan latar belakang: Pertama, dari sisi religiusitas, pura merupakan tempat untuk persembahan dan memanjatkan rasa terima kasih kepada pemberi sumber kehidupan. Kedua, dari sisi politis, puri merupakan simbol kekuasaan yang dapat membentuk citra dan selanjutnya menempatkan kekuasaan puri yang bersangkutan di antara peta puri-puri yang lain. Di sini keagungan dan keindahan dari karya seni dapat menunjukkan kebesaran dan kemasyhuran dari puri yang bersangkutan (Wawancara dengan I Wayan Dibya, 17 November 2012). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman kerajaan maka puri merupakan pusat kebudayaan di Bali.

Dalam sistem agraris pengetahuan tidak ditujukan untuk kepentingan praktis, dan tidak dikumpulkan secara satu persatu dalam jangka waktu tertentu, tetapi lebih merupakan sesuatu “kekuatan” (*taksu*) yang harus didatangkan. Sarana yang paling informal, adalah jalur seni, seperti teater, wayang, dan tarian. Kemasyhuran Kerajaan Badung, menjadi magnet tersendiri bagi para pencari pengetahuan ini, begitu pula pegiat-pegiatnya, hingga tidak berlebih jika pada masa itu, yakni Raja Denpasar, I Gusti Ngurah Made Agung, membuat karya sastra berupa sebuah *geguritan* 91 bait berbahasa Melayu berjudul *Geguritan I Nengah Jimbaran* yang ditulisnya pada tahun 1903 (Kusuma, 2024). Penggunaan bahasa Melayu dalam *Geguritan I Nengah Jimbaran* pada zaman itu merupakan simbol kemajuan dan pengetahuan yang berasal dari puri.

Perkembangan budaya yang pesat dan hampir tidak menyerupai masa sebelumnya terjadi ketika paham modernisasi dengan komersialisasi masuk bersamaan dengan penguasa baru Hindia Belanda. Pada masa kolonial, segala karya seni yang berbau tradisional, dieksplotasi dan diboyong ke negeri mereka, bahkan tidak jarang pelancong (turis) mengambil benda-benda itu dengan alasan sekadar menjadi bukti bahwa dirinya pernah ke Bali. Menyadari kondisi itu, pemerintah Belanda kemudian membangun Museum Bali yang diawali pada tahun 1910 (lihat Gambar 3). Pembangunan museum Bali dibawah pengawasan Asisten Residen Bali Selatan, yaitu W.F.J. Kroon dan proses pembangunan Museum Bali ditangani Curt Grunder seorang arsitek Jerman, dan dibantu oleh 2 tokoh *undagi* Bali, yakni I Gusti Ketut Kandel dari Banjar Abasan dan I Gusti Ketut Rai dari Banjar Belong. Museum Bali ini menerapkan konsep perpaduan antara Pura dan Puri di Bali, dan karena bentuk serta fungsinya tersebut, museum ini kemudian oleh masyarakat awam disebut dengan sebutan, “Kantor Pura”.



Gambar 3. Museum Bali yang dibangun Pemerintah Belanda tahun 1910
Sumber: (Koleksi KITLV 7349)

Fenomena kehadiran para seniman Asing ke Bali tahun 1920-1940-an juga menopang perkembangan seni budaya di Denpasar. Pelukis internasional Andrean Jean Le Mayeur de Merpers, seorang Belgia yang kemudian menikah dengan Ni Nyoman Pollok dari Bali menetap di Sanur. Rumah dan studio lukis Le Mayeur yang berada di Sanur, Denpasar sangat digandrungi oleh pelancong dan wisatawan asing dengan menampilkan lukisan yang semua modelnya adalah Ni Pollok sendiri. Sepeninggal Le Mayeur, rumah seninya yang dihadiahkan pada istrinya Ni Nyoman Pollok yang kemudian dipersembahkan kepada Pemerintah Indonesia, pada tahun 1957 dan ditetapkan sebagai Museum Seni Le Mayeur.

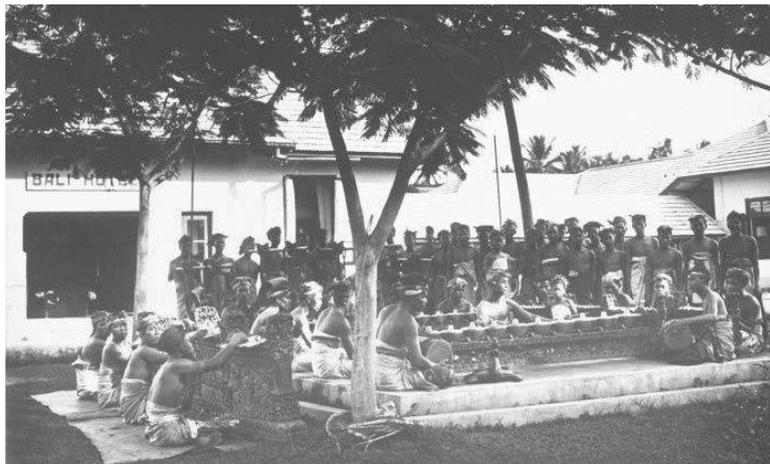
Hotel legendaris yakni Bali Hotel, merupakan akomodasi tertua di Bali yang dibangun sejak tahun 1927 oleh pemerintah kolonial Belanda (Lihat Gambar 4). Hotel ini awalnya merupakan tempat persinggahan para awak kapal perusahaan pelayaran Belanda, KPM, dan dalam perkembangan lebih lanjut berubah peruntukannya menjadi hotel yang dapat diakses oleh umum (Putra, 2010; Tantri, 1960, p.20). Seiring pembukaan Bali Hotel ini pula profanisasi kesakralan karya-karya seni dimulai, dimana menjadi awal dari proses pengringkasan atau "balettisasi" seni. Seni seperti ini akan selalu muncul di mana dan kapan saja, karena pada dasarnya wisatawan menggunakan teori pelancongan yakni datang, melihat dan pergi sambil mengambil dan menikmati hiburan dan rekreasi sebanyak mungkin (Soedarsono, 1999).

Pada sisi lain kehadiran Bali Hotel juga menjadi pencetus lahirnya atau adaptasi karya seni dari daerah luar Denpasar untuk ditampilkan di Bali Hotel (lihat Gambar 5), diantaranya yakni Babarungan Gong pertama di Bali Utara, berkembang pada tahun 1915 dan yang menampilkan tabuh-tabuh keras dan cepat yang menandakan lahirnya seni Gong Kebyar, pada tahun 1920 Sekaa Gong Kebyar Belaluan (Denpasar) didirikan, dan pada tahun 1957 berganti nama menjadi Sekaa Gong Sadmerta Belaluan. Pada masa yang sama, Perusahaan Perekam *Odeon* melakukan rekaman musik-musik di Bali dengan piringan hitam. Dari sisa-sisa piringan hitam yang masih ada, telah berhasil direkonstruksi beberapa tabuh Gong Kebyar, seperti Kebyar Sempati (Wawancara dengan I Wayan Dibia, 17 November

2012). Tahun 1918 Group tari Janger Kedaton dibawa pemerintah kolonial untuk mengadakan pertunjukan ke Batavia.



Gambar 4. Kompleks Bagunan Bali Hotel tahun 1930
Sumber: (Heng, et al., 2007)



Gambar 5. Pementasan seni di depan halaman Bali Hotel 1940
Sumber: (Koleksi Tropenmuseum Amsterdam)

Strategi dan promosi yang digunakan oleh Bali Hotel mampu menahan lebih lama kunjungan wisatawan di Kota Denpasar, sehingga memberikan peluang bagi para penaja seni rupa (terutama seni patung) untuk mengacungkan patungnya kepada wisatawan. Seni patung akhirnya muncul sebagai produk andalan dan sangat diminati oleh wisatawan. Banyak di antara mereka yang ingin menyaksikan langsung proses pembuatannya. Salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan adalah Jeroan Gerenceng, yang terletak di Jalan Sutomo sekarang. Di sini tinggal seorang pematung ternama bernama I Gusti Made Gde. Pematung ini banyak memiliki murid, yang tidak hanya berasal dari Banjar Gerenceng, tetapi juga dari *banjar* lain seperti Banjar Tampak Gangsul, Banjar Sesetan, Banjar Belong, dan murid-murid itu akhirnya menjadi pematung terkenal pada zamannya.

Patung yang dihasilkan oleh seniman-seniman Jeroan Gerenceng dan murid-muridnya serta patung I Tegelan belum mengubah nasib masyarakat Denpasar. Dalam arti pariwisata masih dinikmati oleh segelintir orang. Perubahan mulai terjadi dengan terjadinya invensi dalam pembuatan patung (*togog*), berupa *togog* kecil sehingga mudah dibawa oleh para wisatawan. Memang sangat sulit melacak siapa yang paling awal memelopori pembuatan patung ini. Untuk Desa Catur (yang terdiri dari empat *banjar* Belong, Balun, Panti, dan Gerenceng) yang diakui sebagai pelopor dari patung model ini adalah I Made Dukuh dan I Made Dendi, keduanya berasal dari Panti. Ada dua jenis *togog* yang mereka buat, yakni *togog* setengah badan dan *togog* seluruh badan. Untuk tipe yang pertama terdiri dari penari *janger*, *tengkuluk*, dan *jater*, sedangkan untuk tipe yang kedua terdiri dari patung janger duduk “*metimpuh*”.

Patung-patung jenis ini kemudian menjadi *best seller* dalam bisnis perpatungan di Bali. *Togog* itu dijual kepada para pialang yang sudah menunggu di bawah tiang listrik sambil menggenggam sebuah lampu senter, yang akan digunakan untuk melihat kualitas patung. Jika hari pasaran, dalam arti sedang ada kapal pesiar yang berlabuh di Benoa atau Padang Bai, para pialang ini tidak lagi melakukan tawar-menawar. Dalam situasi seperti itu, para pengrajin semakin banyak memperoleh uang. Tawar-menawar baru terjadi jika sedang tidak ada kapal pesiar yang merapat di kedua pelabuhan itu.

Percepatan paham modernitas menggeser paham sebelumnya berlangsung terus menerus dan sedikit agak terhenti ketika masa pendudukan Jepang. Segala sumber daya yang ada dikonsentraasikan untuk kebutuhan perang. Kegiatan seni pun lebih diarahkan untuk propaganda, melalui seni drama dan tari---dimana pemerintah Jepang tahu bahwa jalur ini efektif. Salah satu kegiatan seni yang mengemuka pada masa itu yakni lomba lukis yang merupakan kelanjutan perlombaan lukis yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1939. Lomba lukis yang diadakan pemerintah Pendudukan Jepang, yakni mencari pelukis terbaik di daerah Badung. Lomba yang fenomenal pada masa itu di Badung, yakni antara I Made Regug atau biasa disebut Dukuh Tektok, dari Desa Peguyangan dan I Made Deblog dari Banjar Taensiat, Denpasar (Parta, et al., 2020). Kedua pelukis ini sama-sama menjadi murid Yap Sin Tin, seorang pelukis potret kelahiran Taiwan dan tinggal di lingkungan Catur (Banjar Belong, Panti, Balun, dan Gerenceng) dengan keahliannya menggunakan tinta Cina. Kedua murid tersebut telah mempunyai dasar melukis yang dipacu suasana *Baliseering* di zaman Belanda (Wijaya, 2012).

Memasuki era kemerdekaan, gairah modernitas bangkit kembali. Budaya agraris yang menjadi dasar perkembangan Kota Denpasar semakin ditinggalkan. Bahkan dalam perkembangan lanjutannya, kini menjadi sebaliknya, bila pada era-era sebelumnya penduduk yang memiliki lahan sempit bermigrasi ke luar Denpasar, seperti membuka hutan untuk dijadikan sawah ke daerah Jembrana atau ke wilayah perkebunan di daerah pegunungan, seperti di Baturiti (Tabanan) dan Kintamani (Bangli), kini menjadi sebaliknya. Denpasar menjadi daerah tujuan, di samping karena lengkapnya sarana prasarana juga terdapatnya sentra pariwisata. Gerak migrasi yang tidak hanya dilakukan oleh orang lokal Nusantara, tetapi lintas Negara ini ikut mendorong perubahan bentuk budaya dan gaya hidup di Denpasar.

Setelah masa pergolakan politik periode 1965 – 1968, dinamika kesenian di Denpasar kembali hidup. Sekitar tahun 1970-an setiap malam minggu 7 group

Drama Gong tampil di panggung-panggung banjar Abian Kapas, Kayu Mas, RRI, Pemedilan, Tampak Gangsul, Titih, dan Taensiat. Panggung-panggung yang pada awalnya diorientasikan untuk masyarakat setempat kemudian berkembang menjadi panggung untuk pariwisata atau dikenal dengan “stage” pada tahun 1971-1972, seperti di Abian Kapas, Sadmerta, Banjar Pande, Bengkel Kedaton, dan Pemedilan. Pada tahun 1971, pagelaran yang bersifat internasional, yakni “Festival Ramayana Internasional”, dilangsungkan di Jaba Pura, Pura Satria. Festival ini diikuti berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina (Wawancara dengan I Wayan Dibia, 17 November 2012).

Tonggak berdirinya Konservatori Karawitan Indonesia (Kokar) dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) kemudian menjadi Sekolah Seni Tari Indonesia (STSI) Denpasar tahun 1967 merupakan kawah candradimuka bagi akademisi Bali di bidang seni. Puncak dari kegiatan seni dan budaya di Bali, yakni Pesta Kesenian Bali yang digagas oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra pada tahun 1979 yang kegiatannya dipusatkan di Art Center Bali yang diresmikan tahun 1978 (Lihat Gambar 6). Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan setiap tahun merupakan barometer kesenian tradisional di Bali (Wija, 2013). Sementara Taman Budaya (Art Center) Bali merupakan bangunan megah dan terbesar menempati lahan seluas 5 hektar yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan budaya dan seni di Bali. Dengan demikian, kegiatan Pesta Kesenian Bali dan keberadaan Art Center Bali semakin meneguhkan Denpasar sebagai Kota Budaya atau pusat kebudayaan Bali.



Gambar 6. Bali Art Center atau Taman Budaya yang dibangun tahun 1979
Sumber: (Koleksi Dinas Pariwisata Kota Denpasar)

Kesimpulan

Dari uraian di atas, tampak transformasi Denpasar yang berkembang dari awalnya kota agraris kemudian menjadi kota budaya pada awal hingga medio abad XX. Setelah peristiwa Puputan Badung 1906, Denpasar kemudian memasuki era modern, sejak penguasaan kolonial Hindia Belanda atas Kerajaan Badung. Walaupun di era kerajaan merupakan daerah agraris, namun dengan keberadaan pantai di sisi selatan pusat kerajaan, memungkinkan dunia perdagangan ikut mewarnai perekonomian Denpasar.

Zaman kolonial menjadi, titik awal masa modernisasi Denpasar dalam arti pembangunan fisik, namun di sisi lain Belanda dengan kebijakan *Baliseering*-nya menjadikan Bali termasuk Denpasar sebagai Museum Kehidupan (*living museum*). Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Museum Bali pada tahun 1910 dan Bali Hotel yang dibangun pada 1928 justru mengubah tidak saja bangunan puri menjadi hotel, tetapi juga wajah Kota Denpasar. Bali Hotel memberikan kesempatan bagi orang-orang dari luar Denpasar terutama Gianyar untuk memasarkan produk keseniannya di Denpasar, sehingga mereka tampil sebagai pematung-pematung handal dan akhirnya membuka jaringan bisnis pariwisata di Bali. Dari segi seni pertunjukan, Bali Hotel juga telah memberikan andil yang cukup besar terutama dengan diberikannya kesempatan bagi para penari untuk tampil di wantilannya. Beberapa penari solo, baik pada masa kolonial maupun republik pernah mengembangkan diri dari wantilan Bali Hotel. Sedangkan secara kelompok, Bali Hotel juga telah berpengaruh terhadap pertumbuhan *sekeha-sekeha gong* dan *legong* di Bali, yang lebih berorientasi pada kepentingan wisatawan.

Denpasar yang pada awalnya lebih berkarakter agraris, dengan penyediaan berbagai fasilitas baik yang terencana oleh pemerintah kolonial maupun yang berkembang spontan, bergerak menjadi masyarakat urban. Pemerintah Belanda tidak semata-mata berkepentingan pada komoditas Bali atau pada percepatan pertumbuhan ekonominya. Untuk itu, secara terencana pembangunan sarana prasarana dilakukan, bendungan dibangun seperti salah satunya Dam Oongan, untuk lebih memacu tingkat produktivitas pertanian yang kemudian dapat diangkut melalui jalan-jalan beraspal, jembatan dan pelabuhan yang baru dibangun di Benoa serta dikapalkan ke pusat-pusat perdagangan luar.

Dari sisi budaya, dinamika masyarakat lebih kental dengan warna yang bersifat religiusitas, seperti seni untuk persembahan kepada Yang Kuasa dalam wilayah sakral bergeser menjadikan kesenian dikomersialkan dan ke wilayah profan. Pada perkembangannya kemudian menjadikan Denpasar sebagai salah satu rujukan kesenian Bali, salah satunya dikenal kesenian dengan "Gaya Bebadungan". Berdirinya ASTI (ISI Denpasar) tahun 1967, pembangunan Art Center Bali tahun 1978, dan bergulirnya Pesta Kesenian Bali di Denpasar tahun 1979 sebagai puncak kegiatan kebudayaan Bali meneguhkan Denpasar sebagai barometer kota budaya dan Pusat Kebudayaan Bali.

Referensi

- Agung, A. A. G. P. (1971). *Perdagangan Budak di Bali Abad XIX*. In *Basis*. Jogjakarta: Jajasan Basis.
- Agung, A. A. G. P. (2001). *Paralihan Sistem Birokrasi: Dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agung, A. A. G. P. 2001. "Kuta dalam Lintasan Sejarah", In Edi Setyadi dan Susanto Zuhdi (ed.), *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Agung, I. A. A. G. (1989). *Bali Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ANRI. (1971). *Laporan Politik Tahun 1837 [Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837]*. Djakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sedjarah ANRI.

- Ardhana, I K. (2005). Denpasar: Perkembangan dari Kota Kolonial Hingga Kota Wisata. In Freek Colombijn et al. (ed.). *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, dan UNAIR, NIOD.
- Block, P. (ed.) (2007). *Mads Lange: The Bali Trader and Peacemaker*. Bali Purnati Book.
- Broek, H. A. van den. (1835). Verslag Nopens het Eiland Bali: de Vorsten, Hunne Geaardheid en Betrekingen, den Handel, de Culture, de Bevolking, Hare Zeden en Gewoonten, Godsdiens en Andere Bijzonderheden. In *Oosterling I*.
- Creese, H., Putra, N. D., Nordholt, H. S. (2006). *Seabad Puputan Badung: perspektif Belanda dan Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan, Fakultas Sastra UNUD dan KITLV.
- Geertz, Cl. (2000). *Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*. Yogyakarta: Bentang.
- Geuns, M. van. (1906). *Door Badoeng en Tabanan Een ander over Bali en Zijne Bewoners*. Soerabaja: Soerabaja Handelsblads.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Haks, L., & Wachlim, S. (2004). *Indonesia: 500 Early Postcards*. Singapore: Archipelago Press.
- Hanna, W. A. (1990). *Bali Profile: People, Events, Circumstances 1001-1976*. Maluku: Rumah Budaya Banda Naira.
- Heng, A. K., Sujana, K., Adnyana, I. B. P. (2007). *Bali, 3 balinese Photographers: 1913-2007*. Denpasar: Griya Santrian.
- Indische Gids, (1908). De Opium-regie op Bali. *Indische Gids*, No. 30. 1908.
- Kol, H. H. van. (1914). *Driemaal Dwars door Sumatra en Zwerftochten door Bali* deel I & II. Rotterdam: W.L. & J. Brusses Uitgeversmaatcappij.
- Korn, V. E. (1932). *Het Adatrecht van Bali*. 's-Gravenhage: G. Naeff.
- Kraan, A. van der. (1993). Bali: 1848. In *Indonesia Circle* No. 62. London: Oxford University Press.
- Kusuma, I N. W. (2024). *Geguritan Berbahasa Melayu "Nengah Jimbaran" Karya I Gusti Ngurah Made Agung: Teks, Transliterasi, dan Terjemahan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Lekkerkerker, C. (1921). De Baliërs. In J.C. van Eerde, *De Volken van Nederlandsch Indie: In Monographieen*, deel II. Amsterdam: Uitgevers Maatschappij ELSEVEIR.
- Lekkerkerker, C. (1923). Het Voorspel der vestiging van de Nederlansche macht op Bali. In *BKI* 79.
- Loon, A.G. van (1915). *Peta Denpasar 1915*. Leiden: KITLV (Kode D F 11,7).

- Nordholt, H. S. (2006). *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV Jakarta.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., Saptari, R. (2008). *Perspekti Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor, Pustaka Larasan, dan KITLV.
- Parta, I. W. Y., et al. (2020). *I Gusti Made Deblog: Master Seni Lukis Naturalis dalam Medan Seni Rupa Denpasar-Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan dan Gurat Institute.
- Pendit, N. S. (2007). *Bali Berjuang*. Denpasar: Pustaka Larasan dan Sarad.
- Putra, I N. D. (2007). *Wanita Bali Tempo Doeloe: Perspektif Masa Kini*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Putra, I N. D. (2010). Peta Kota Denpasar 1915 Buatan Belanda. *Bali Post*.
- Putra, I N. D. (2021). "Dari Kota Modern ke Kota Budaya: Seabad Sejarah Pencitraan Kota Denpasar 1910-an-2010-an." In I Wayan Tagel Eddy & Slamet Trisila (ed.). *Benang Merah Revolusi dan Historiografi Kekinian Persembahan Purna Tugas Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan S.U.* Denpasar: Pustaka Larasan dan Prodi Ilmu Sejarah FIB Universitas Udayana.
- Raka, I G. G. (1955). *Monografi Pulau Bali*. Djakarta: Pusat Djawatan Pertanian Rakjat.
- Roon, N. J. van. (1917). Landbouw Veeteelt, Nijverheid en Handel op Bali. In *Tijdschrift voor Economische Geographie*, No. 8.
- Soedarsono, R.M. (1999). *Seni Pertunjukan Indonesia & Pariwisata*. Bandung: MSPI.
- Soenaryo, F. X. (1989). Sejarah Kota Denpasar 1906-1942. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1883, XXVI.
- Swellengrebel A. H. (1960). *Bali Studies in Life, Thought and Ritual*. The Hague-Bandung: Van Hoeve Ltd.
- Tantri, K. (1960). *Revolt in Paradise*. London: Willan Heinemann Ltd.
- Tim Penulis Sejarah. (2024). *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali hingga Nusantara*. Denpasar: Pustaka Larasan dan Yayasan Kerti Budaya.
- Trisila, S. (2008). Siasat Bisnis Orang-Orang Cina di Bali Sekitar Abad XIX. In *Sejarah Yang Memihak*. Nursam, et al., (Ed). Yogyakarta: Ombak.
- Utrecht, E. (1962). *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung: Sumur Bandung.
- Vickers, A. (1989). *Bali a Paradise Created*. California: Periplus Editions.
- Wawancara dengan I Wayan Dibya, Guru Besar (Emiritus) ISI Denpasar, Usia 70 Tahun di Denpasar.
- Wawancara dengan I Wayan Geriya, Mantan Dekan FIB Unuversitas Udayana, Usia 74 tahun di Batubulan, Gianyar.

Anak Agung Ayu Dewi Girindrawardani, Slamet Trisila/Transformasi Denpasar dari Kota Agraris Menjadi Kota Budaya, 1906-1979

Weber, M. (1977). Apakah yang Disebut Kota. In *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*. Kartodirdjo, S. (Ed). Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wija, I N. (2013). *Pesta Kesenian Bali, Pesta Media Massa*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Wijaya, I N. (2001). Denpasar dalam Lintasan Sejarah. In *Makalah Seminar*.

Wirawan, A. A. B., at al. (2011). *Sejarah Kota Denpasar: Dari Kota Keraton hingga Kota 1788-2010*. Denpasar: Bapeda kota Denpasar.